

Persepsi Pemangku Kepentingan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sekitar Tambang

Muhammad Ihsan Mattalitti¹, Abd. Rahman²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah

Kendari^{1,2}

Email: ihsan.mattalitti@umkendari.ac.id

Naskah diserahkan: 20-06-2022;
Direvisi: 28-06-2022;
Diterima: 29-06-2022

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan hasil studi kasus tentang persepsi para pemangku kepentingan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa sekitar tambang di salah satu desa di Sulawesi Tengah. Data dikumpulkan dari 12 orang partisipan melalui wawancara mendalam. Data yang terkumpul dianalisis isi dan mengacu pada kerangka analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa masyarakat mengakui pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui pembinaan kepada masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebab masih banyak warga desa yang belum ikut berpartisipasi. Salah satu faktor terkait rendahnya partisipasi masyarakat tersebut karena sebagian besar warga bekerja sebagai pekerja tambang.

Katakunci: desa sekitar tambang; partisipasi masyarakat; pemangku kepentingan; pembangunan desa; studi kasus.

ABSTRACT: *This study aims to present the results of a case study on stakeholders' perceptions of community participation in village development activities around mining area in a village in Central Sulawesi. Data were collected from 12 participants through in-depth interviews. Using content analysis and community participation in development as analytical framework, the results of data analysis depict that the community acknowledges the village government's various efforts to encourage community participation through community development and community involvement in village development. However, the community involvement in village development is still lacking due to limited villagers' participation. One of the reliant factors for the low participation is because most of the residents are mining workers.*

Keywords: case study; community participation; stakeholders; village development; village around mining area.

PENDAHULUAN

Keberlangsungan pembangunan suatu kawasan telah lama dikaitkan dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat di dalamnya (Philips, & Pittman, 2008).

Dalam konteks pembangunan pedesaan, pemerintah desa memainkan peran penting dalam memberikan pelayanan pemerintahan serta merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pemerintah (Angelia, dkk., 2020). Posisi pemerintah yang terdekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa karena ia bertindak sebagai pembina, pengayom dan penyedia layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa memegang salah satu peran kunci keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Nugroho & Suprapto, 2021).

Dalam konsep otonomi daerah dan desentralisasi desa (Nadir, 2013) tujuan dari otonomi dan desentralisasi yang dimaksud adalah peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan kepada masyarakat, perkembangan kreativitas daerah, pemerataan pembangunan, keleluasaan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan terwujudnya demokrasi khususnya di tingkat pemerintahan desa (Ermaya, 2016). Hal ini nampak dari bentuk keterlibatan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa (Malik, 2020). Hal ini adalah salah satu bentuk partisipasi masrayakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Secara kontekstual, Cohen dan Uphoff (1980) mengemukakan dua bentuk partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi dalam konteks politik dan partisipasi dalam konteks pembangunan. Sutiyo dan Maharjan (2017) berargumen bahwa dalam konteks pembangunan desa, konsep partisipasi yang diusung oleh Cohen dan Uphoff (1980) ini yang dianggap tepat dijadikan acuan. Dalam konsep partisipasi Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi meliputi manusia yang terlibat di dalam tahapan pembangunan desa dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, perolehan manfaat, dan evaluasi. Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan meliputi kegiatan mengidentifikasi masalah, menghasilkan ide, menilai pilihan dan membuat pilihan. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dapat berupa sumbangan uang tunai, tenaga dan materi, partisipasi dalam administrasi proyek dan pendaftaran. Sementara itu, partisipasi dalam memperoleh manfaat mencakup kegiatan dimana masyarakat memanfaatkan program. Dalam keterlibatan evaluasi, masyarakat melakukan evaluasi atau penilaian terhadap program dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas apa yang telah dilakukan. Terkait jenis partisipasi masyakarat dalam proses pembangunan, Hurairah (2008) mengungkapkan berbagai macam partisipasi, misalnya 1) partisipasi buah pikiran yang biasa ditemui dalam pertemuan atau rapat; 2) partisipasi tenaga yang bisa dilihat dalam berbagai kegiatan perbaikan atau pembangunan prasarana; 3) partisipasi harta benda yang diberikan untuk perbaikan atau pembangunan dalam bentuk uang, makanan dan sebagainya; dan, 4) partisipasi keterampilan dan kemahiran yang diberikan untuk mendorong berbagai bentuk usaha.

Kajian empiris terkait partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan telah banyak dilakukan di tingkat global seperti di Cina (Qin, Li, Lu, & Pan, 2020), Nigeria (Laah, Adefila, & Yusuf, 2014), Tanzania (Muro & Namusonge, 2015), dan Ukraina (Kvartiuk & Curtiss, 2019). Sementara itu, penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan di Indonesia juga telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus seperti partisipasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa (Damayanti & Syarifuddin, 2020; Jannah & Rodiyah, 2021), jenis partisipasi dan faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa (Muslimin, Arsyad, & Sarmadan, 2020), dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di desa (Hanum, 2019).

Meskipun telah banyak penelitian ilmiah yang dilakukan terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan, akan tetapi belum banyak kajian empiris di konteks Indonesia yang menginvestigasi bagaimana keterlibatan masyarakat di kawasan lingkar tambang (lihat Alamsyah, Agustang, Adam, & Alim, 2021; Sayuti, Jullimursyida, Mariyudi, & Zulkarnaen, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan empiris tersebut dengan melakukan studi kasus yang fokus pada persepsi pemangku kepentingan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada tataran empiris, praktis, dan kebijakan. Secara empiris, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian serupa yang fokus pada pengembangan desa sekitar tambang. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi umpan balik bagi para pemangku kepentingan desa dalam mendesain program pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Dari segi kebijakan, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian para pengambil kebijakan terkait pembangunan desa berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administratif salah satu desa di Provinsi Sulawesi Tengah. Desa Matarape adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 23,22 km². Desa ini dapat dicapai melalui darat dan laut. Jarak desa ini cukup jauh dari ibukota provinsi (760 km). Jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten Morowali lebih dekat (120 km) daripada jarak ke pusat pemerintahan kecamatan (230 km). Berdasarkan data terakhir tahun 2020, jumlah penduduk di desa ini sebesar 545 jiwa (262 laki-laki, 283 perempuan). Sebagian besar penduduknya adalah pekerja tambang, pegawai negeri sipil, pedagang dan petani (Tabel 1).

Tabel 1 Data Demografi Profesi Penduduk Desa Matarape (Tahun 2020)

Pekerjaan	Jumlah	Persentasi (%)
PNS	10	3%
Aparat Desa	35	10%
Pekerja Tambang	150	42%

Mahasiswa	40	11%
Masyarakat biasa/tidak bekerja	120	34%
Total	355	100%

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari informan yang ditentukan melalui *purposive sampling* karena informan secara sengaja dipilih berdasarkan kedalaman pemahaman mereka tentang partisipasi masyarakat di Desa Matarape sehingga dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang hendak digali secara mendalam (Rapley, 2014). Informan penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan delapan warga desa. Data yang dikumpulkan berasal dari data hasil wawancara mendalam dan dokumen terkait. Wawancara dilakukan dengan menghubungi informan dan meminta waktu mereka untuk wawancara. Hasil rekaman wawancara lalu dibuat ke dalam transkrip (Kowal & O'Connell, 2014) yang selanjutnya dianalisis melalui prosedur koding, kategorisasi, reduksi data, dan tematisasi (Roulston, 2014) berdasarkan kerangka analisis partisipasi masyarakat (Cohen & Uphoff, 1980).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil analisis data menunjukkan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi aktif warganya untuk terlibat dalam pembangunan desa. Pemerintah Desa Matarape melakukan berbagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui pembinaan kepada masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Pelibatan masyarakat oleh pemerintah desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebab masih banyak masyarakat yang belum ikut berpartisipasi dikarenakan sebagian besar warga bekerja sebagai pekerja tambang.

Upaya Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan usaha pemerintah desa untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan masyarakat pembangunan desa demi tercapainya tujuan bersama. Hasil analisis data terkait pelibatan masyarakat oleh pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, beserta aparat lainnya nampak dari koordinasi antar pemangku kepentingan untuk merealisasikan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Pemerintah Desa Metarape telah berupaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa melalui pembuatan rabat beton sepanjang 200 meter serta pembuatan jamban keluarga bagi yang belum memiliki jamban. Hal tersebut dilakukan pemerintah desa untuk

mengembangkan keterampilan masyarakat serta meminimalisir angka pengangguran di kalangan masyarakat. Pelibatan masyarakat oleh pihak pemerintah desa seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Pembangunan sebagai berikut.

“Masyarakat turut serta dalam pembangunan rabat beton dan jamban keluarga yang diikuti oleh beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai tukang dengan berbagai macam keahlian dalam bidang bangunan. Mereka turut serta dalam memberikan masukan dan usulan dalam penentuan rencana pembangunan desa melalui musyawarah”. (Wawancara, Kepala Desa, 5 Desember 2021).

“Sudah ada sebagian masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan desa baik dari musyawarah bersama terkait perencanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan”. (Wawancara, Sekretaris Desa, 5 Desember 2021)

“Saya melihat pemerintah desa saat ini sudah melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa meskipun belum sepenuhnya masyarakat ikut serta dalam kegiatan tersebut. Pemerintah Desa Matarape selalu membuka peluang untuk masyarakat yang mau menyumbangkan gagasannya terkait pembangunan desa, namun terkadang masih ada masyarakat yang hanya datang sekedar mengikuti pertemuan tanpa memberi masukan”. (Wawancara, Kaur Pembangunan, 6 Desember 2021)

Untuk mengonfirmasi kebenaran pernyataan dari Pemerintah Desa Matarape terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, hasil analisis data wawancara dengan beberapa masyarakat menunjukkan kecenderungan yang sama.

“Pemerintah desa saat ini sudah melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa. Saya pribadi pernah mengikuti rapat pembahasan pembangunan rabat beton dan bahkan saya sempat mengusulkan untuk membuat jamban di setiap rumah warga. Alhamdulillah diindahkan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Selain itu saya juga ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan dalam menjadi tukang dalam penggerjaan rabat baton di Desa Matarape”. (Wawancara, Warga #3, 8 Desember 2021)

“Saya melihat pemerintah Desa Matarape selalu memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa, namun hanya sedikit masyarakat yang memiliki inisiatif untuk turut berpartisipasi sebab kebanyakan masyarakat di

sini sibuk dengan urusan tambang, sehingga jarang melirik pembangunan desa ataupun berpartisipasi langsung dalam pembangunan desa". (Wawancara, Warga #2, 8 Desember 2021)

"Pemerintah Desa Matarape sejauh ini sudah melibatkan masyarakat namun itu hanya sebagian dalam artian masyarakat yang hanya memiliki waktu luang saat rapat maupun pelaksanaan pembangunan berlangsung. Saya pribadi mengakui belum pernah mengikuti rapat maupun kegiatan pelaksanaan pembangunan desa sebab keseharian saya bekerja sebagai pekerja tambang, sehingga tidak ada waktu untuk mengikuti rapat atau sejenisnya yang berkaitan dengan pembangunan desa". (Wawancara, Warga #1, 8 Desember 2021)

Hasil wawancara dengan warga desa menguatkan apa yang diungkapkan oleh pihak pemerintah desa. Masyarakat telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan pembangunan desa tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebab masih banyak masyarakat yang belum ikut berpartisipasi. Ketidakaktifan mereka dalam kegiatan pembangunan desa karena sebagian besar masyarakat Desa Matarape berprofesi sebagai pekerja tambang. Oleh karena itu, tidak jarang jika kegiatan pembangunan desa berjalan hanya beberapa orang warga yang ikut berpartisipasi dan selebihnya adalah aparat desa.

Hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Matarape telah melakukan berbagai usaha untuk melibatkan masyarakat dalam suatu musyawarah pembangunan, tetapi kebanyakan masyarakat masih kurang sadar pentingnya keterlibatan dalam kegiatan pembangunan desa. Minimnya partisipasi masyarakat tersebut dapat berakibat negatif pada hal lain yang berhubungan dengan pembangunan desa.

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Hasil analisis data terkait bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa Matarape menunjukkan beberapa hal, yaitu 1) partisipasi dalam perencanaan atau pengambilan keputusan; 2) partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan; dan, 3) partisipasi dalam evaluasi pembangunan.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan atau Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam tahapan perencanaan ini menuntut peran aktif masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan apa yang akan diputuskan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan warga desa. Dalam tahapan ini masyarakat diberi peluang untuk berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran maupun kritik tentang perencanaan pembangunan melalui berbagai pertemuan yang diadakan antara masyarakat dan pemerintah.

Hasil analisis data wawancara dengan para pemangku kepentingan di Desa Matarape mengungkapkan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai usaha untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah pembangunan,

tetapi masih banyak warga yang kurang sadar pentingnya terlibat dalam kegiatan perencanaan pembangunan tersebut. Petikan wawancara dengan pihak pemerintah desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Pembangunan) dapat mengungkapkan bagaimana persepsi mereka terkait partisipasi masyarakat dalam tahapan pengambilan keputusan untuk pembangunan desa mereka.

“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangat dibutuhkan sekali demi kelancaran serta ketepatan pembangunan yang akan direncanakan. Sebagian masyarakat sudah berpartisipasi dalam rencana pembahasan pembangunan desa. Namun dibalik itu, masih ada juga masyarakat yang tidak peduli karena mereka menganggap bahwa tanpa ikut pun semua tetap akan berjalan. Ini disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang pembangunan dan belum merasa ada tanggungjawab dalam pelaksanaannya. Selain itu, keseharian masyarakat adalah pekerja tambang yang tentu akan sangat berpengaruh pada partisipasinya dalam mengikuti rapat pembahasan perencanaan pembangunan”. (Wawancara, Kepala Desa, 5 Desember 2021)

“Saya melihat masyarakat disini mayoritas pekerja tambang jadi tidak heran jika mereka lebih mendahulukan pekerjaannya ketimbang menghadiri rapat desa. Untuk partisipasi masyarakat Desa Matarape dalam pengambilan keputusan saya anggap masih sangat rendah sebab belum setengah dari keseluruhan masyarakat yang bisa datang dan hadir dalam setiap rapat pembahasan rencana pembangunan desa”. (Wawancara, Sekretaris Desa, 5 Desember 2021)

“Tercapainya pembangunan desa tentu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kami selaku pemerintah Desa Matarape selalu berusaha mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam pembahasan perencanaan pembangunan melalui rapat desa. Saya manilai masyarakat disini masih banyak yang tidak peduli dengan pembangunan desa terlebih saat pelaksanaan rapat pembahasan perencanaan pembangunan, terkadang masyarakat yang menghadiri rapat hanya beberapa orang saja padahal sebelumnya sudah disampaikan melalui surat. (Wawancara, Kaur Pembangunan, 6 Desember 2021)

Untuk mengecek kebenaran pernyataan dari Pemerintah Desa Matarape terkait partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan atau pengambilan keputusan untuk kegiatan pembangunan desa, hasil analisis data wawancara dengan beberapa warga menunjukkan kecenderungan yang sama.

“Saya pribadi baru sekitar dua kali lah ikut serta dalam pembahasan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan Desa Matarape”. (Wawancara, Warga #7, 9 Desember 2021)

“Saya pribadi mengakui bahwa selama ini saya belum pernah mengikuti rapat pembahasan perencanaan pembangunan desa sebab keseharian saya sebagai pekerja tambang jadi tak heran jika saya tidak bisa hadir dirapat perencanaan bahkan sampai pada rapat pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan apa yang akan dilaksanakan”. (Wawancara, Warga #5, 8 Desember 2021)

“Ya kalau ditanya partisipasi, saya pribadi mengakui belum pernah ikut serta dalam rapat perencanaan sampai pengambilan keputusan pembangunan Desa Matarape”. (Wawancara, Warga #6, 8 Desember 2021)

“Saya selaku masyarakat belum bisa secara aktif ikut berpartisipasi karena disebabkan keseharian saya bekerja di tambang”. (Wawancara, Warga #8, 9 Desember 2021)

Petikan data hasil wawancara dengan warga desa mengonfirmasi pandangan pihak pemerintah Desa Matarape terkait rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan desa. Hal ini diakui sendiri oleh sejumlah warga yang hanya beberapa kali sempat ikut dalam rapat pengambilan keputusan. Lebih banyak lagi warga yang karena kesibukannya di pekerjaan mereka sehingga berdampak pada tingkat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang masih rendah. Hal ini utamanya diakui oleh warga yang berprofesi sebagai pekerja tambang.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Partisipasi warga dalam pelaksanaan pembangunan lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam bentuk materi yang bersifat benda wujud yang terlihat jelas seperti partisipasi dalam bentuk modal maupun sumbangan uang maupun sumbangan tenaga dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan, masyarakat desa memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan keberhasilan dalam pembangunan.

Hasil analisis data penelitian mengungkap bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Matarape. Hal tersebut digambarkan dalam petikan-petikan data hasil wawancara bersama Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Pembangunan desa berikut.

“Pelaksanaan pembangunan desa sesuai hasil dari musyawarah pengambilan keputusan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan

pembangunan desa kami selalu berusaha mengikutsertakan masyarakat untuk ikut aktif. Namun, dibalik itu hanya beberapa masyarakat yang ikut berpartisipasi, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan rabat beton. Masyarakat yang memiliki keahlian dibidang bangunan kami jadikan sebagai kepala tukang, selebihnya sebagai kuli. Saya melihat masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dibanding masyarakat yang ikut berpartisipasi". (Wawancara, Kepala Desa, 5 Desember 2021)

"Saya melihat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa masih sangat kurang. Saat pembangunan rabat beton pun sedikit sekali masyarakat ikut serta dalam pelaksanaannya". (Wawancara, Sekretaris Desa, 5 Desember 2021)

"Jangankan untuk pelaksanaan pembangunan desa, rapat pengambilan keputusan pun sedikit sekali masyarakat yang ikut serta didalamnya. Tak heran peristiwa ini terjadi karena mayoritas masyarakat Desa Matarape merupakan pekerja tambang". (Wawancara, Kaur Pembangunan, 6 Desember 2021)

Data hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa di atas menunjukkan bagaimana upaya mereka untuk selalu melibatkan warga dalam tahapan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi, tingkat partisipasi masyarakat masih tetap rendah disebabkan lebih banyak warga yang bekerja di tambang saat proses pelaksanaan pembangunan desa berjalan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh beberapa warga yang diwawancara terkait partisipasi mereka dalam tahapan pelaksanaan pembangunan. Berikut petikan data yang relevan.

"Alhamdulilah sejauh ini saya selalu dipercaya untuk menjadi tukang dalam setiap pelaksanaan pembangunan desa mulai dari pembuatan rabat beton sampai pembuatan jamban". (Wawancara, Warga #3, 8 Desember 2021)

"Saya belum pernah ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan desa". (Wawancara, Warga #2, 8 Desember 2021)

"Saya sendiri belum pernah ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa, sebab saya terikat oleh pekerjaan tambang. Tidak heran karena hari-hari saya lebih banyak di tambang". (Wawancara, Warga #1, 8 Desember 2021)

"Saya belum secara aktif ikut dalam pelaksanaan pembangunan desa Matarape sebab saya adalah salah satu pekerja tambang. Jadi

memang keseharian saya habiskan di daerah tambang” (Wawancara, Warga #4, 10 Desember 2021)

Berdasarkan data hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Matarape sejauh ini masih kurang. Hal ini dapat terungkap dari minimnya jumlah masyarakat yang terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam program pembangunan desa, pemerintah desa harus mengikutsertakan masyarakat karena mereka bukan hanya sekedar menikmati hasil pembangunan saja, akan tetapi mereka pun ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dari hal ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan yang mereka ikut rencanakan apakah dapat berhasil sesuai target atau tidak. Disamping itu, salah satu tujuannya agar tercipta suasana kebersamaan dan keterbukaan, sehingga pembangunan yang sudah direalisasikan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Partisipasi dalam Evaluasi Pembangunan Desa

Tahap evaluasi dalam program pembangunan desa bertujuan untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif dalam pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi sangat penting pada proses akhir dari program pembangunan desa tersebut. Evaluasi program dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan program yang telah masyarakat rumuskan.

Hasil analisis data wawancara dengan pihak pemerintah desa dan warga desa mengungkapkan bagaimana partisipasi warga dalam evaluasi pembangunan Desa Matarape yang dapat dilihat dari petikan data berikut ini.

“Keterlibatan masyarakat dalam memantau hasil pembangunan desa sangat dibutuhkan agar apa yang menjadi kendala dalam proses pembangunan dapat kami ketahui. Sebagian masyarakat sudah turut memantau meskipun tidak terlibat langsung dalam proses pembangunan”. (Wawancara, Kepala Desa, 5 Desember 2021)

“Masyarakat juga ikut memantau dan melakukan evaluasi. Walaupun masyarakat tidak turut serta dalam pelaksanaanya, akan tetapi sebagian dari mereka melakukan pemantauan dari depan rumah”. (Wawancara, Sekretaris Desa, Tanggal 5 Desember 2021)

Hal senada juga disampaikan oleh warga desa dalam petikan data sebagai berikut:

“Dalam proses evaluasi saya hanya menyaksikan saja tanpa terlibat langsung dalam mengevaluasi pembangunan desa”. (Wawancara, Warga #6, 8 Desember 2021)

“Dalam tahap evaluasi pembangunan desa saya hanya memantau dari jauh tanpa terlibat langsung dalam mengevaluasi pembangunan”. (Wawancara, Warga #2, 8 Desember 2021)

“Saya hanya menyaksikan dari kejauhan saja saat proses evaluasi berjalan” (Wawancara, Warga #8, 9 Desember 2021)

“Saya belum pernah ikut langsung dalam proses evaluasi, ya palingan hanya menyaksikan dari kejauhan saja” (Wawancara, Warga #1, 8 Desember 2021)

“Saya pribadi tidak pernah mengikuti pemantauan atau evaluasi pembangunan karena mengingat keseharian saya di tambang. Namun jika dilihat, pembangunan desa saya rasa sudah cukup baik”. (Wawancara, Warga #4, 10 Desember 2021)

Hasil wawancara dengan segenap pihak pemerintah desa dan masyarakat Desa Matarape selaku pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan desa Matarape juga masih rendah, sama seperti partisipasi mereka pada tahapan pembangunan lainnya. Hal ini terungkap dari pernyataan hampir seluruh informan yang mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat hanya menjadi penonton serta menyaksikan dari jauh tanpa terlibat langsung dalam proses evaluasi pembangunan Desa Matarape.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan keterlibatan masyarakat desa dalam tahapan pembangunan desa yang meliputi siklus perencanaan, pelaksanaan, perolehan manfaat, dan evaluasi. Penelitian ini membuktikan bahwa konsep partisipasi Cohen dan Uphoff (1980) juga berlaku di tingkat pemangku kepentingan desa. Pada pengambilan keputusan atau perencanaan dalam penelitian ini menunjukkan peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan apa yang akan diputuskan sesuai dengan keinginan masyarakat yang bersangkutan (Cohen & Uphoff, 1980) meskipun tingkat partisipasinya masih terbilang rendah. Dalam penelitian ini, masyarakat desa telah diberi kebebasan untuk berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik tentang perencanaan pembangunan melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan antara masyarakat dan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Laah, dkk. (2014) yang juga menemukan bahwa tingkat kesadaran partisipasi masyarakat terkait erat dengan kesempatan yang diciptakan pihak pemerintah desa agar masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemerintah Desa Matarape telah melakukan berbagai usaha untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah terkait pembangunan desa. Hal ini juga dikonfirmasi oleh warga desa baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Meskipun pemerintah desa telah berupaya memberi ruang partisipasi bagi warga desanya, akan tetapi masih banyak warga yang masih kurang sadar pentingnya turut serta dalam perencanaan pembangunan tersebut. Hal ini sejalan dengan argumen Qin, dkk. (2020) yang menyatakan bahwa pembangunan desa juga bergantung pada jumlah warga yang dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam setiap musyawarah pembangunan diadakan, kehadiran masyarakat masih tergolong sangat minim. Minimnya partisipasi masyarakat tersebut berdampak negatif pada hal lain yang berhubungan dengan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai rencana jika adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah (Lah, dkk., 2014; Qin, dkk., 2020). Pemerintah berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat dan masyarakat berperan sebagai sumber informasi pembangunan yang akan direncanakan berdasarkan keputusan bersama.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan karena masyarakat merupakan sumber informasi dalam perencanaan pembangunan (Hanif, 2011). Pengambilan keputusan merupakan langkah yang paling utama dalam memberikan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dengan memberikan peluang yang maksimal terhadap masyarakat (Hurairah, 2008; Jannah & Rodiyah; 2021). Dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana para pemangku kepentingan terlibat dalam tahap perencanaan pembangunan desa. Akan tetapi, partisipasi dari pihak warga masih minim karena keterikatan mereka dengan pekerjaan di tambang.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengambilan keputusan (Cohen & Uphoff, 1980) sehingga masyarakat akan selalu dilibatkan dalam kegiatan diskusi ataupun musyawarah. Pembangunan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat telah dilibatkan sejak rencana awal pengambilan keputusan dan diikutsertakan dalam proses pembangunan (Khairudin, 2000). Masyarakat desa harus memiliki keinginan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pembangunan desa (Sutiyo & Maharjan, 2017). Dengan adanya keinginan tersebut maka masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang sesuai dengan perencanaan awal.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pasti melibatkan peran pemerintah desa. Dalam penelitian ini Kepala Desa memiliki peran dalam memengaruhi masyarakat agar mau ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Kepala Desa mengaku bahwa Pembangunan yang baik ialah pembangunan yang tumbuh dan dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh masyarakat yang nantinya akan merasakan dampak positif dari hasil pembangunan tersebut (Qin, dkk., 2020).

Penyebab lain yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ialah rasa kurang peduli masyarakat terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan minimnya kepedulian warga desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Sejalan dengan penelitian Kvartiak dan Curtiss (2019), hal ini terjadi bukan karena mereka benar-benar tidak peduli, tetapi karena sebagian besar warga desa harus berada di tambang sebagai tempat kerja mereka.

Evaluasi, sebagai bagian akhir siklus pembangunan desa, adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hasil itu terjadi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keadaan tersebut (Cohen & Uphoff, 1980). Dengan kata lain, dalam penelitian ini evaluasi merupakan upaya untuk mengetahui program telah dilaksanakan dengan melihat hasil yang dicapai serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh partisipasi masyarakat, mulai dari pemberian input hingga evaluasi program. Pemerintah Desa Matarape telah mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan pembinaan serta pelibatan masyarakat. Namun, hal ini belum optimal disebabkan belum banyak masyarakat yang berpartisipasi karena sebagian besar warga bekerja di tambang. Rendahnya partisipasi masyarakat terlihat dalam seluruh tahapan proses pembangunan desa. Bahkan dalam evaluasi pembangunan, masyarakat cenderung hanya menjadi penonton tanpa terlibat langsung dalam proses evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengindikasikan perlunya sosialisasi sebagai upaya pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara melaksanakan program pembangunan dengan baik agar mencapai keberhasilan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada pihak Pemerintah Desa Matarape dan seluruh masyarakat Desa Matarape yang telah memberikan akses dalam pengambilan data yang dibutuhkan sehingga penelitian ini bisa terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A., Agustang, A., Adam, A., & Alim, A. (2021). Partisipasi Teritorial Masyarakat Lingkar Tambang Morosi Kabupaten Konawe. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (hal. 1-15). Makassar: LP2M Universitas Negeri Makassar.
- Angelia, N., Batubara, B. M., Zulyadi, R., Hidayat, T. W., & Hariani, R. R. (2020). Analysis of Community Institution Empowerment as a Village Government Partner in the Participative Development Process. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), 1352-1359.

- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity. *World Development*, 8(3), 213-235.
- Damayanti, R., & Syarifuddin, S. (2020). The Inclusiveness of Community Participation in Village Development Planning in Indonesia. *Development in Practice*, 1-11. doi:10.1080/09614524.2020.1752151
- Ermaya, B. S. (2015). Kemandirian Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan Pedesaan. *Jurnal Litigasi*, 16(2), 2835-2874.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Hanum, W. N. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Film Dokumenter *Sexy Killers* (2019). *Osf. Io, April*.
- Hurairah, A. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Jannah, A., & Rodiyah, I. (2021). Community Participation in Village Infrastructure Development Planning. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 10, 1-6.
- Khairudin, S. S. (2000). *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta: Penerbit Liberti.
- Kowal, S., & O'Connell, D. C. (2014). Transcription as a Crucial Step of Data Analysis. Dalam U. Flick (Ed.), *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*, (hal. 79-93). SAGE.
- Kvartiuk, V., & Curtiss, J. (2019). Participatory Rural Development Without Participation: Insights from Ukraine. *Journal of Rural Studies*, 69, 76–86. doi:10.1016/j.jrurstud.2019.04.002
- Laah, E. D., Adefila, J. O., & Yusuf, R. O. (2014). Community Participation in Sustainable Rural Infrastructural Development in Riyom Area, Plateau State of Nigeria. *Journals of Economics and Sustainable Development*, 5(4), 49-57.
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325-343.
- Muro, J. E., & Namusonge, G. S. (2015). Governance Factors Affecting Community Participation in Public Development Projects in Meru District in Arusha in Tanzania. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 4(6), 106-110.
- Muslimin, Arsyad, M., & Sarmadan. (2020). Participation of Community in Rural Development in Oengkolaki Village Mawasangka District Central Buton Regency. *Indonesian Journal of Social and Environmental Issues*, 1(1), 33-38.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 1-21. doi:10.24252/profetik.v1i1a7
- Nugroho, R., & Suprapto, F. A. (2021). *Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 1: Konsep Dasar*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Phillips, R., & Pittman, R. (2008). *An Introduction to Community Development*. Routledge.

- Qin, X., Li, Y., Lu, Z., & Pan, W. (2020). What Makes Better Village Economic Development in Traditional Agricultural Areas of China? Evidence from 338 Villages. *Habitat International*, 106, 1-11. doi:10.1016/j.habitatint.2020.102
- Rapley, T. (2014). Sampling Strategies in Qualitative Research. Dalam U. Flick (Ed.), *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*, (hal. 49-63). SAGE.
- Roulston, K. (2014). Analysing Interviews. Dalam U. Flick (Ed.), *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*, (hal. 49-63). SAGE.
- Sayuti, M., Jullimursyida, J., Mariyudi, M., & Zulkarnaen, T. (2014). Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion untuk Pemberdayaan Masyarakat Tambang Batubara di Provinsi Aceh. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi*, (hal. 1-13). Aceh: Universitas Malikussaleh.
- Sutiyo & Maharjan, K. L. (2017). Community Participation in Rural Development. Dalam Sutiyo dan K. L. Maharjan (Eds.), *Decentralization and Rural Development in Indonesia* (hal. 125-138). Singapore: Springer.